



# UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

## FAKULTAS PERTANIAN

Jalan Sutomo No. 4 A Telepon (061) 4522922 ; 4522831 ; 4565635 P.O.Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia

Panitia Ujian Sarjana Pertanian Strata Satu (S-1) Fakultas Pertanian dengan ini menyatakan :

**Nama** : Omirais Lawolo


**NPM** : 20720035

**Program Studi** : Agribisnis

Telah mengikuti Ujian Lisan Komprehensif Sarjana Pertanian Program Strata Satu (S-1) pada hari Selasa, 20 Agustus 2024 dan dinyatakan **LUHUS**.

### PANITIA UJIAN

Penguji I

  
Ir. Maria R. Sihotang, MS

Ketua Sidang

  
Albina Br. Ginting, SP, M.Si

Penguji II

  
Albina Br. Ginting, SP, M.Si

Pembela

  
Dr. Ir. Hotden L. Nainggolan, M.Si

Dekan



  
Dr. Ir. Hotden L. Nainggolan, M.Si

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Subsektor tanaman perkebunan kelapa sawit merupakan subsektor yang memegang peranan penting sebagai penyumbang devisa negara terbesar, mesin perekonomian negara, penggerak sektor ekonomi rakyat, dan membuka lapangan kerja (Purba & Sipayung, 2018). Permintaan akan minyak sawit olahan begitu besar sehingga perkebunan kelapa sawit Indonesia siap tumbuh sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia (Harahap, 2017).

Laju pertumbuhan tanaman sawit di Indonesia dari tahun 2012 hingga 2021 sebesar 44,29%. Sedangkan pada tingkat Kabupaten khususnya Deli Serdang sebesar 1,85% (BPS). Setiap tahun, populasi terus bertambah sehingga membutuhkan lebih banyak area untuk tempat tinggal. Sekitar 85-90% dari minyak sawit mentah yang dikenal sebagai *crude palm oil* (CPO) yang diproduksi di dunia di dominasi oleh Indonesia dan Malaysia.

**Tabel 1.1 Negara Penghasil CPO Terbesar Dunia 2024.**

Negara	Produksi (Ton Metrik)
<b>Indonesia</b>	<b>36.000.000</b>
<b>Malaysia</b>	<b>21.000.000</b>
Thailand	2.200.000
Kolombia	1.320.000
Nigeria	970.000
Dunia	58.800.000

*Sumber: Diolah dari Indonesian Investments (2024)*

Ada enam provinsi yang menjadi penyumbang terbesar produksi minyak sawit Indonesia berkontribusi sebesar 73,69 persen terhadap produksi minyak dari seluruh Indonesia. Pusat produksi CPO terbesar di Indonesia berada di Provinsi

Riau dan Sumatera Utara dengan kontribusi masing-masing 23,75 persen dan 16,24 persen (Hudori, 2017).

Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah penghasil produksi sawit terbesar dengan luas lahan pada tahun 2021 mencapai 442.072,76 Ha. Dari luas tersebut terdapat luas usahatani kelapa sawit rakyat di Kabupaten Deli Serdang yang merupakan salah satu wilayah di Sumatera Utara, sebagai sentra pengembangan kelapa sawit rakyat. Luas area kelapa sawit rakyat di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 mencapai 14,190 juta ha, dengan produksi 229.195,45 ton (BPS, 2021).

Ada tiga cara menjalankan perkebunan kelapa sawit di Indonesia: pola perusahaan, plasma, dan swadaya. Pola swadaya menurut (Yutika *et al*, 2019) adalah pengembangan perkebunan kelapa sawit oleh petani itu sendiri, dimulai dari tanpa hubungan korporasi, pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan penjualan hasil. Namun banyak perkebunan sawit rakyat (PSR) masih dikelola dengan tidak memperhatikan lingkungan. Meskipun perkebunan kelapa sawit telah berperan penting bagi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun bisnis kelapa sawit masih menghadapi kesulitan lingkungan yang signifikan (Envihsa, 2020).

Akhir-akhir ini, pembangunan berkelanjutan telah menjadi masalah kritis dan kebutuhan dalam banyak disiplin ilmu pembangunan, termasuk perkebunan kelapa sawit, dalam skala nasional, regional, dan global (Saragih *et al*, 2020). Penerapan konsep tata kelola produksi dan tata kelola yang baik pada setiap model bisnis perkebunan kelapa sawit diperlukan untuk meminimalkan risiko kerusakan lingkungan dan sumber daya alam (Dharmawan, 2019). Penerapan standar

keberlanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik pada hakekatnya adalah upaya internalisasi biaya eksternalitas efek buruk yang berasal dari risiko kegiatan produksi sedemikian rupa sehingga kerusakan lingkungan dapat dikurangi (Amalia *et al*, 2019).

Indonesia telah membuat standar atau sertifikasi untuk produk kelapa sawit yang disebut *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Menurut Permentan No. 11 Tahun 2015, pemerintah harus menerapkan sistem ISPO karena meningkatnya emisi gas rumah kaca. ISPO diwajibkan untuk semua bisnis perkebunan di Indonesia. Sertifikasi ISPO untuk perkebunan rakyat telah mulai dirumuskan sejak tahun 2012 dan finalisasinya selesai bulan Desember 2014.

Pemerintah mengamanatkan akreditasi ini karena beberapa alasan, salah satunya untuk memastikan perkebunan kelapa sawit tidak merusak lingkungan. Mengenai manfaat yang dapat diperoleh petani yang melakukan revitalisasi sawit rakyat, antara lain: 1) meningkatkan produksi tanaman kelapa sawit. 2) membantu mereka yang ingin mengembangkan usahanya di industri kelapa sawit. 3) sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional, khususnya pada masa epidemi. Penanaman kembali juga dapat membantu industri kelapa sawit bertahan lebih lama. Pemerintah Indonesia bahkan telah menetapkan target efektif peremajaan lahan kelapa sawit seluas 540.000 hektar pada tahun 2022 (Tampubolon *et al*, 2021).

Masalah dan tantangan yang kerap terjadi pada pada sistem ISPO (Fahamsyah & Pramudya, 2018). **Pertama**, Masalah mendasar kurangnya pemahaman bersama tentang apa itu keberlanjutan dalam pengelolaan dan pengembangan kelapa sawit, apa artinya dan bagaimana cara kerjanya. Petani kelapa sawit rakyat merupakan salah satu pelaku usaha yang paling sedikit

melakukan sertifikasi (Utami & Halimatussadiyah, 2021). Petani sawit rakyat kemungkinan tidak tertarik untuk menerapkan ISPO karena rendahnya proporsi mata pencaharian mereka dari kelapa sawit. Banyak lahan yang dianggap ilegal dan dikecualikan dari sertifikasi ISPO (Dharmawan *et al*, 2019). **Kedua** Metode kelembagaan pelaksanaan sertifikasi ISPO. **Ketiga** esensi konsep, standar, dan indikasi sistem sertifikasi ISPO. **Keempat** pendanaan dan legalitas proses sertifikasi ISPO. **Kelima** adopsi program sertifikasi ISPO di pasar Internasional (*Policy Brief*). Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan ISPO, 25 Oktober 2016, masa depan negara sangat bergantung pada bagaimana masyarakat melestarikan kearifan lokalnya saat ini dan bagaimana individu kembali berpikir holistik.

Peran kearifan lokal dapat membina hubungan yang baik dengan masyarakat lokal dengan menyikapi dan beradaptasi terhadap nilai, prinsip, norma, lembaga dan tradisi yang tumbuh dan berkembang secara empiris dalam kehidupan masyarakat lokal (Syaiquddin *et al*, 2017) sehingga dapat menjadi analisa yang baik dalam mempengaruhi keberhasilan dalam minat adopsi sertifikasi ISPO. Sumber daya alam dan lingkungan hidup masyarakat dapat dimanfaatkan dan dilestarikan tanpa mengganggu keseimbangan. Telah dibuktikan bahwa kearifan lokal telah berhasil menghindarkan lingkungan dari kerusakan. Namun, kearifan lokal kini mulai memudar. Akibatnya sumber daya alam tidak lagi terpelihara dengan baik (Weningtyas & Widuri, 2022).

Komponen kunci tata kelola yang mendukung keberlanjutan kelapa sawit adalah kolaborasi antara petani kecil dan perusahaan pemasoknya (Ichsan *et al*, 2021). Kemitraan usaha antara perusahaan dan pekebun diharapkan dapat memberdayakan, membangun dan mengembangkan industri perkebunan kelapa

sawit melalui sistem kerjasama yang saling menguntungkan, saling mengisi, terintegrasi dan berkesinambungan, sehingga pekebun dapat mengatasi keterbatasannya dan terfasilitasi kebutuhannya dalam menjalankan usahanya (Nasution *et al*, 2023). Agar petani kelapa sawit mampu mengelola hasil perkebunan maka alangkah baiknya diterapkan sistem ISPO secara efektif sehingga bisa membantu pembangunan nasional negara melalui sumbangsih devisa negara (Fuadah, 2018).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang ingin diangkat ialah:

1. Bagaimana pemahaman petani terhadap sertifikasi ISPO pada usahatani kelapa sawit rakyat di Kabupaten Deli Serdang.
2. Bagaimana pengaruh peran kemitraan terhadap minat adopsi sertifikasi ISPO pada usahatani kelapa sawit rakyat di Kabupaten Deli Serdang.
3. Bagaimana pengaruh peran kearifan lokal terhadap minat adopsi sertifikasi ISPO usahatani kelapa sawit rakyat di Kabupaten Deli Serdang.
4. Bagaimana model minat adopsi melalui kemitraan dan kearifan lokal untuk pengembangan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Deli Serdang

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengidentifikasi pemahaman petani terhadap sertifikasi ISPO pada usahatani kelapa sawit rakyat di Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengidentifikasi pengaruh peran kemitraan terhadap minat adopsi sertifikasi ISPO pada usahatani sawit rakyat di Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengidentifikasi pengaruh peran kearifan lokal terhadap minat adopsi sertifikasi ISPO, usahatani sawit rakyat di Kabupaten Deli Serdang.
4. Untuk mengidentifikasi model minat adopsi melalui kemitraan dan kearifan lokal untuk pengembangan sawit berkelanjutan di Kabupaten Deli Serdang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) di Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas HKBP Nommensen Medan.
2. Memberikan sumbangsih bagi dunia keilmuan, khususnya dalam hal pemahaman petani kelapa sawit rakyat akan sertifikasi dan agar dapat memanfaatkan peluang pada keberlanjutan sawit dimasa yang akan datang.
3. Sebagai bahan informasi dan referensi yang dapat menambah dan memperkaya bahan kajian teori untuk pengembangan penelitian selanjutnya

## 1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran akan dibentuk untuk memahami implementasi sertifikasi ISPO pada kelapa sawit rakyat melalui kemitraan dan kearifan lokal untuk pengembangan sawit yang berkelanjutan di Kabupaten Deli Serdang. Implementasi sertifikasi ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*) di Kabupaten Deli Serdang akan dipahami melalui kemitraan antara petani kelapa sawit rakyat dengan perusahaan pengolah kelapa sawit besar, serta dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam konteks budaya dan praktik pertanian tradisional di daerah tersebut.

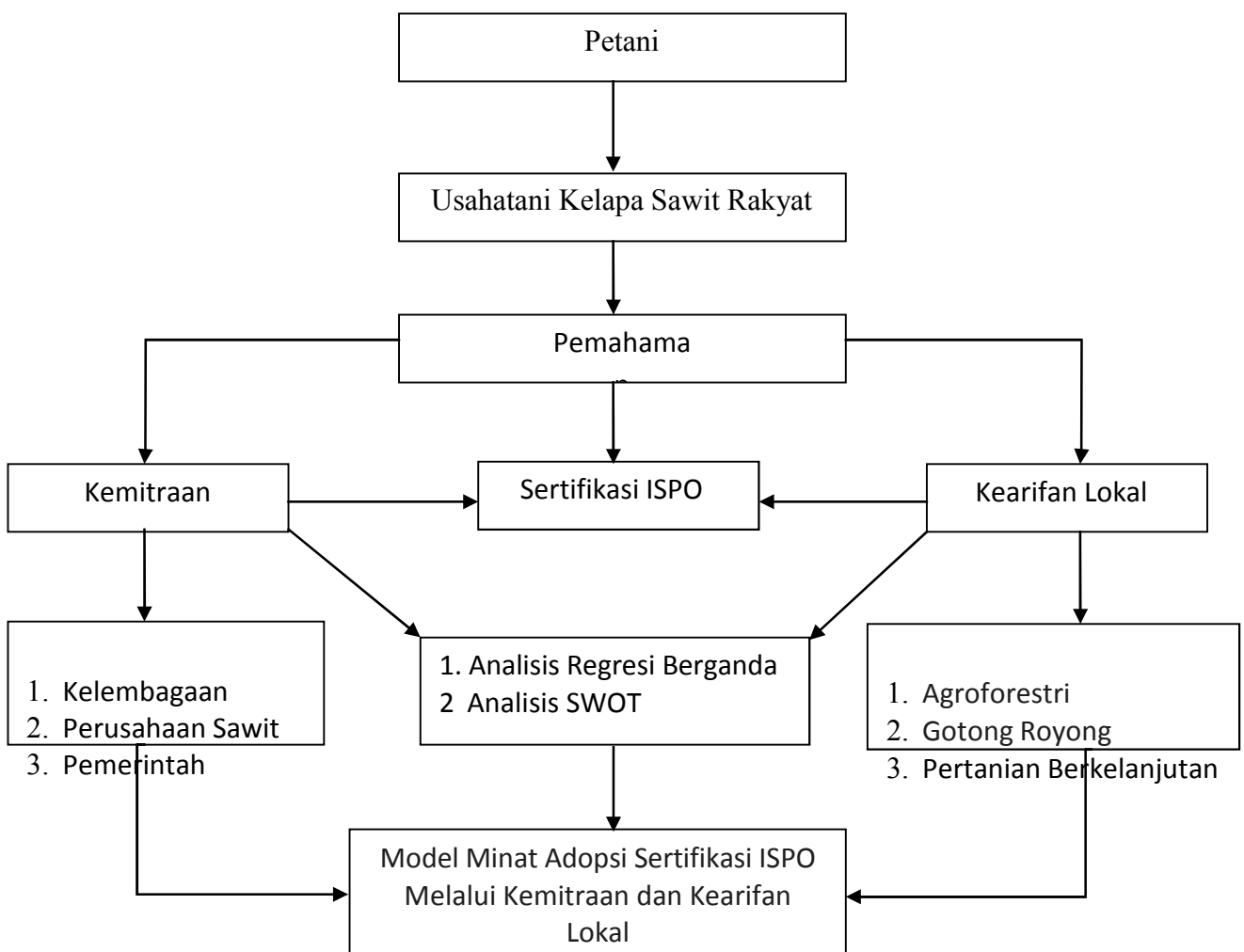
Penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap konsep sertifikasi ISPO itu sendiri, termasuk standar, kriteria, dan prosedur yang diperlukan untuk memperoleh sertifikasi. Hal ini akan menjadi dasar untuk memahami bagaimana implementasi sertifikasi ISPO dilakukan dalam konteks pengembangan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya, akan dipelajari mengenai kemitraan antara petani kelapa sawit rakyat dan perusahaan pengolah kelapa sawit besar. Kemitraan ini merupakan salah satu strategi penting dalam implementasi sertifikasi ISPO, di mana perusahaan pengolah kelapa sawit besar memberikan dukungan teknis, finansial, dan akses pasar kepada petani kelapa sawit rakyat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi ISPO.

Analisis juga akan melibatkan peran serta kearifan lokal dalam implementasi sertifikasi ISPO. Aspek-aspek seperti keberlanjutan lingkungan, manajemen lahan, dan praktik pertanian yang menjadi bagian dari kearifan lokal akan diselidiki untuk menilai sejauh mana nilai-nilai tersebut terintegrasi dalam upaya pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan di Kabupaten Deli Serdang. Dengan demikian,



melalui kerangka pemikiran ini, diharapkan dapat dipahami bagaimana implementasi sertifikasi ISPO pada kelapa sawit rakyat melalui kemitraan dan kearifan lokal dapat berkontribusi terhadap pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan di Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk memudahkan dalam proses penganalisaan permasalahan dapat di kemukakan pada kerangka pemikiran pada gambar 1.4



**Gambar 1.4 Kerangka Pemikiran Model Minat Adopsi Sertifikasi ISPO pada Kelapa Sawit Rakyat Melalui Kemitraan dan Kearifan Lokal untuk Pengembangan Sawit yang Berkelanjutan di Kabupaten Deli Serdang**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pemahaman Petani**

Pemahaman adalah kemampuan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan sesuatu (Sari, 2017). Pemahaman berasal dari kata paham dalam KBBI paham berarti mengerti. Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memahami relevansi dan makna informasi yang disampaikan (Susanti, 2019). Tahap pengetahuan adalah tahap penting untuk awal adopsi inovasi. Pengetahuan petani dapat mempengaruhi tindakan atau sikap mereka dalam mengambil keputusan, termasuk menerima atau tidak menerima inovasi (Setiyowati *et al.*, 2022).

Pemahaman petani tentunya membutuhkan persiapan mental sebelum memilih untuk mengadopsi dan menggunakan teknologi terhadap inovasi tersebut (Sirajuddin, 2015). Menurut Zen *et al.* (2021) petani tidak memahami lebih dalam sistem budidaya kelapa sawit yang maju dan konservatif karena peran kelembagaan dalam konservasi sumber daya alam kurang memadai dan belum terfokus pada kelapa sawit berkelanjutan, dan pemahaman lembaga antar kolaborasi tentang perlunya mengatasi masalah petani dengan perusahaan kelapa sawit swadaya yang ekspansif sangat terbatas. Pendidikan di bidang perkebunan masih ditekankan untuk meningkatkan pemahaman petani. Berbagai inisiatif telah dan terus diciptakan, baik oleh pemerintah maupun bekerja sama dengan masyarakat (Sekali *et al.*, 2020).

## 2.2. Sertifikasi ISPO

Penerapan prinsip *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* bagi petani kelapa sawit Indonesia berdasarkan Permentan 38 tahun 2020 bersifat wajib. Kebijakan ini ditetapkan oleh pemerintah agar pengelolaan kebun sawit petani dapat diusahakan secara berkelanjutan. Namun demikian, implementasi ISPO sampai saat ini masih terbatas (Rosnita *et al*, 2022). ISPO merupakan standarisasi industri perkebunan kelapa sawit sebagai jaminan berkelanjutan yang telah dipersyaratkan oleh pelanggan Internasional atas produk minyak sawit Indonesia. Bagi Indonesia tujuan ISPO secara internal adalah sebagai pedoman/standar industri perkebunan dan secara eksternal adalah sebagai pengantar menuju pasar Internasional, dengan tujuan utama mencapai produk kelapa sawit berkelanjutan sehingga dapat memberikan keunggulan kompetitif.

Manfaat utama penerapan standar ISPO membantu industri perkebunan untuk mengidentifikasi dan memenuhi peraturan perundangan yang relevan, meningkatkan kesiapan terhadap tekanan pasar di masa depan, meningkatkan produk minyak kelapa berkelanjutan di pasar nasional, meningkatkan daya saing produk serta menjaga kelestarian lingkungan. Prinsip dalam ISPO mencakup masalah teknis perkebunan dan masalah legalitas perkebunan (Fadhillah *et al*, 2021). Menurut Hadi *et al*,(2023) pekebun swadaya yang menghadapi peraturan yang rumit dan ketat serta kendala keuangan memiliki kecepatan implementasi ISPO yang tertunda. Sementara Akibatnya, hanya ada beberapa insentif yang ditawarkan, seperti harga yang lebih tinggi, regulasi yang lebih sederhana, dan pendanaan. Dalam sertifikasi ISPO untuk perkebunan besar tercantum tujuh

prinsip, 41 kriteria dan 126 indikator pada aturan untuk membangun industri kelapa sawit kearah lebih positif.

### **2.3. Perkebunan Sawit Rakyat**

Perkebunan kelapa sawit rakyat merupakan salah satu komponen rantai pasok agribisnis kelapa sawit yang secara bertahap dipaksa untuk menerapkan langkah-langkah keberlanjutan. Perkebunan tanpa kemampuan manajerial menempatkan petani pada posisi yang kurang menguntungkan (Saragih *et al.*, 2020). Perkebunan kelapa sawit swadaya terus berkinerja buruk dibandingkan dengan BUMN, swasta, dan multinasional dalam hal output dan produktivitas. Karena tanaman sudah tua dan perlu peremajaan (penanaman kembali), kurangnya sumber daya dan keahlian teknologi, kurangnya rencana penggantian rutin untuk tanaman berdasarkan umurnya, dan faktor lainnya, sehingga hasilnya buruk (Heriyanto, 2018). Hasil yang rendah disebabkan oleh berbagai masalah, termasuk penggunaan benih, metode pertanian, dan kurangnya sumber daya manusia.

Menurut Azahari (2018), fakta bahwa perkebunan kelapa sawit rakyat masih didorong oleh pertimbangan ekonomi menjadi tantangan dalam penerapan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, tetapi hal ini seharusnya tidak menghalangi para pembuat kebijakan untuk melakukannya. Gagasan pertanian berkelanjutan yang mengacu pada sistem pertanian yang menitikberatkan pada keseimbangan ekonomi, sosial dan ekologi diterapkan dalam perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. ISPO diterapkan di perkebunan kelapa sawit sebagai solusi dalam menghadapi tantangan dalam penerapan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan (Harly & Afrijon, 2017).

Dampak merugikan dari perkebunan kelapa sawit masih terlihat di beberapa sektor. Perkebunan rakyat mencapai 53% dari total, diikuti oleh perkebunan swasta besar (40,9%), dan perkebunan perusahaan negara mencapai (6,1%). Meskipun swadaya memiliki luas perkebunan kelapa sawit terbesar. Ini berlaku untuk kuantitas dan kualitas kebun sawit rakyat yang hanya menghasilkan 11,4 ton per hektar setiap tahunnya (Murdy *et al*, 2021). Banyak perkebunan kelapa sawit rakyat yang saat ini berjalan secara independen dari pihak lain menyebabkan sejumlah masalah, antara lain skala usaha yang relatif kecil, akses modal dan teknologi yang terbatas, akuisisi infrastruktur produksi, dan pemasaran tandan buah segar (TBS). Kemitraan antara petani kecil dan perusahaan lain yang berkepentingan dengan industri perkebunan kelapa sawit diperlukan karena situasi ini berdampak pada sulitnya membangun perkebunan kelapa sawit rakyat (Putra *et al.*, 2020).

#### **2.4. Kemitraan**

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang kemudian diperluas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, menetapkan pengertian dan prinsip-prinsip kemitraan usaha resmi. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kemitraan, kerjasama antara usaha kecil dan menengah atau usaha besar didukung dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemitraan ini bertujuan untuk memperkuat perusahaan perkebunan rakyat sehingga petani dapat memperoleh manfaat dari ketersediaan sarana produksi, kepastian pasar, dan

produktivitas serta pendapatan petani yang lebih tinggi (Munirudin *et al.*, 2020). Salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk kelapa sawit atau perkebunan kelapa sawit di pasar global adalah kerjasama dalam bentuk kemitraan antara perusahaan perkebunan besar dan perkebunan rakyat.

Meskipun program kemitraan perkebunan belum mampu menghilangkan ketimpangan secara maksimal, kekurangan tersebut dapat diperbaiki dengan memberdayakan petani mitra dan perusahaan (Baka *et al.*, 2023). Penerapan pola kemitraan sangat penting untuk keberhasilannya, proses kemitraan memerlukan peningkatan intensitas hubungan inti dan plasma berdasarkan kepercayaan yang nyata dan terukur. Kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak menjadi tolak ukur keberhasilan kerja sama (Saputra *et al.*, 2017). Menurut Carlson *et al.*, (2018), praktik pengelolaan berkelanjutan yang diterapkan melalui kemitraan antara perusahaan, pemerintah, dan lembaga lingkungan hidup dapat mengurangi deforestasi dan degradasi habitat. Inisiatif seperti penggunaan lahan secara efisien dan pengurangan emisi gas rumah kaca dari perkebunan kelapa sawit juga berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim. Secara keseluruhan, kolaborasi yang erat antara berbagai pihak dapat menghasilkan solusi efektif terhadap tantangan lingkungan yang dihadapi oleh industri kelapa sawit.

## **2.5. Kearifan lokal**

Berdasarkan KBBI kearifan didefinisikan sebagai kebijaksanaan, sedangkan lokal didefinisikan sebagai daerah setempat. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 30 mendefinisikan kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola

lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal dapat diartikan sebagai pengetahuan budaya yang hadir dalam sistem dan struktur sosial masyarakat tertentu dan mencakup berbagai pengetahuan budaya, serta panduan untuk mengelola, memberdayakan, dan memanfaatkan sumber daya alam dan sosial secara berkelanjutan (Hannan & Rahmawati, 2020).

Dominasi modernisasi yang didukung pemerintah dengan tujuan mendorong perekonomian nasional menjadi faktor penyebab merosotnya kearifan lokal selain dipandang tidak mendukung perbaikan ekonomi rakyat. Kearifan lokal mendapat perhatian baru di sejumlah daerah ketika modernisasi justru memunculkan persoalan baru, khususnya degradasi lingkungan (Daulay & Hunowu, 2023). Masyarakat Indonesia memandang kearifan lokal sebagai perilaku dan kegiatan yang mendukung kelestarian lingkungan dan alam. Kearifan lokal mengontrol bagaimana suatu komunitas berinteraksi dengan lingkungannya secara bijak. Dalam upaya pelestarian lahan, kearifan lokal Indonesia berbeda-beda menurut budaya dan wilayah (Rusdiyana *et al*, 2021).

Bentuk kearifan lokal yang dimaksud dalam konteks adopsi sertifikasi ISPO dalam usahatani sawit rakyat dapat mencakup berbagai praktik, nilai, dan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun di masyarakat setempat seperti praktik pengolahan lahan, praktik pengolahan air, konservasi keanekaragaman hayati dan lain sebagainya. Kearifan lokal juga melibatkan pelestarian budaya dan pengetahuan tradisional dalam praktik pertanian. Petani yang bekerja sama dengan perusahaan kelapa sawit dapat mempertahankan praktik pertanian berkelanjutan yang didasarkan pada nilai-nilai budaya dan tradisi mereka. Ini termasuk memilih varietas kelapa sawit yang cocok dengan kondisi lokal, menggunakan metode

pemupukan dan pengendalian hama tradisional, serta berbagi pengetahuan lokal tentang perlindungan keanekaragaman hayati. Dengan mempertahankan kearifan lokal dalam praktik pertanian, kemitraan antara petani dan perusahaan kelapa sawit dapat memperkuat pelestarian budaya dan lingkungan. Nilai-nilai kearifan lokal sangat penting dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup serta dapat menyelesaikan permasalahan terkait di masyarakat (Baka *et al.*,2024).

Syahza dan Irianti (2021) menyatakan bahwa kearifan lokal berperan dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar perkebunan kelapa sawit. Selain itu, kearifan lokal mendukung penggunaan sumber daya alam dan memelihara kebiasaan, norma, serta perilaku masyarakat setempat. Contohnya termasuk hubungan erat masyarakat dengan alam (tanaman, air, dan tanah) dan kebiasaan berkebun.

## **2.5 Ide Terdahulu**

Penelitian Setiawati *et al.*(2020) dengan judul dampak sosial ekonomi program pemberdayaan petani kebun kelapa sawit rakyat di Kabupaten Bangka menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Petani dalam Kelompok Tani Sukses Bersama di Desa Zed, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka telah diberikan berbagai sarana pemberdayaan ekonomi melalui Program Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat, antara lain pengembangan pengetahuan, sosialisasi petani pemilik lahan potensial, pembinaan teknis perkebunan kelapa sawit, pengembangan sistem ekonomi kebersamaan berbasis manajemen kemitraan (SKEBMK), dan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT). Efek sosial ekonomi Kelompok Tani Sukses



Bersama memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi Kelompok Tani Sukses Bersama.

Penelitian Subinus *et al.* (2020), dengan judul implementasi sertifikasi *Indonesian sustainable palm oil system* (ISPO) pada petani kelapa sawit swadaya di Kabupaten Sanggau dengan metode penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian kecil petani telah mematuhi prinsip dan kriteria ISPO, namun masih banyak yang belum. Solusi yang diusulkan termasuk pembentukan kelompok tani untuk membantu petani dalam memenuhi persyaratan sertifikasi ISPO. Penelitian juga menyoroti perlunya peningkatan implementasi ISPO, terutama dalam hal kelembagaan petani, teknis budidaya, dan pengolahan kebun. Meskipun belum terbentuk secara resmi, upaya awal pembentukan kelompok tani telah dimulai untuk meningkatkan kualitas usaha pertanian petani sawit swadaya.

Penelitian Hutabarat (2022), yang berjudul ISPO dan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dengan metode penelitian deskriptif menggunakan Skala Likert. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ISPO pada perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia sangat rendah. ISPO hanya diterapkan pada pekebun yang mendapatkan bantuan dan fasilitas dari perusahaan mitra dan lembaga pendamping, yang jumlahnya sangat terbatas. Mayoritas pekebun tidak memiliki pengetahuan memadai tentang ISPO dan sosialisasi tentang ISPO belum optimal. Keterbatasan sosialisasi, jumlah perusahaan dan lembaga pendamping yang membantu, serta akses terhadap informasi menyebabkan kendala serius dalam penerapan ISPO. Kondisi ini

menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan kebun sawit di Indonesia ke depannya.

Penelitian Arifandy *et al.* (2018) dengan judul analisis pengaruh adopsi ISPO terhadap perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan dan perubahan sosial ekonomi masyarakat yang menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa adopsi ISPO dapat meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan, memberikan manfaat ekonomi, serta berdampak positif pada pendapatan masyarakat, pendidikan, dan persepsi publik terhadap perusahaan. Implementasi sertifikasi ISPO juga membantu dalam perbaikan kualitas air limbah, pengurangan emisi CO<sub>2</sub>, pengelolaan limbah B3, dan penanganan gangguan sumber tidak bergerak. Program CSR juga memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Penelitian Hasudungan (2023) yang berjudul pengaruh penerapan *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) terhadap pendapatan petani kelapa sawit di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan yang menggunakan metode penelitian analisis uji beda (*paired sample t-test*) dan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa petani yang sudah ISPO menerima harga TBS yang lebih tinggi, dengan rata-rata harga tertinggi Rp. 3.400/kg dan harga terendah Rp. 2.000/kg, sementara petani yang belum ISPO hanya menerima rata-rata harga tertinggi Rp. 2.400/kg dan harga terendah Rp. 1.700/kg. Hal ini disebabkan oleh akses pasar yang lebih baik dan harga premium yang didapatkan oleh produsen kelapa sawit yang sudah ISPO. Oleh karena itu, terdapat perbedaan pendapatan antara petani ISPO dan Non-ISPO.

Penelitian Liana *et al.* (2023) yang berjudul kendala penerapan sertifikasi keberlanjutan oleh perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia: sebuah tinjauan empiris yang menggunakan metode studi pustaka. Berdasarkan temuan penelitian empat kendala utama dalam penerapan sertifikasi keberlanjutan bagi perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia, yaitu rendahnya pengetahuan petani tentang konsep keberlanjutan, rendahnya kelembagaan atau organisasi petani kelapa sawit, persepsi bahwa sertifikasi keberlanjutan hanya untuk petani kaya, dan kurangnya monitoring dan evaluasi pemerintah di lapangan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah perlu merumuskan aturan yang sesuai dengan kondisi pekebun rakyat, termasuk penyuluhan dan pendampingan sertifikasi keberlanjutan, serta menetapkan aturan yang jelas mengenai reward, punishment, serta monitoring dan evaluasi berkala di lapangan.

Penelitian Nur (2020) yang berjudul penerapan prinsip sertifikasi ISPO pada perkebunan kelapa sawit rakyat di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan metode penelitian survey dan koesioner. Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan petani kelapa sawit terhadap sertifikasi ISPO secara keseluruhan rendah karena pengetahuan tentang manfaat, kemudahan, dan risiko berada dalam kategori rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan informasi yang diterima oleh petani. Penerapan prinsip dan kriteria sertifikasi ISPO di kebun kelapa sawit petani berada dalam kategori sedang, menunjukkan bahwa sebagian praktik perkebunan menuju standar sertifikasi ISPO.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sinemba Tanjung Muda (STM) Hulu dan Sinemba Tanjung Muda (STM) Hilir Kabupaten Deli Serdang. Penentuan daerah penelitian dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan bahwa daerah ini merupakan 3 besar penghasil produksi kelapa sawit rakyat terbanyak di Kabupaten Deli Serdang. Luas tanaman dan rata-rata produksi kelapa sawit tanaman perkebunan rakyat menurut kecamatan di Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat dari tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1 Luas tanaman dan rata-rata produksi kelapa sawit tanaman perkebunan rakyat menurut kecamatan di Kabupaten Deli Serdang**

Kecamatan	Luas Tanaman dan Rata-rata Produksi Kelapa Sawit Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Kecamatan			
	TBM (ha)	TM (ha)	Total Luas Tanam (ha)	Produksi (ton)
	2015	2015	2015	2015
Gunung Meriah	38.05	351.74	394	5676
<b>S.T.M. Hulu</b>	<b>109.97</b>	<b>1623.64</b>	<b>1787.4</b>	<b>27629.45</b>
Sibolangit	6.09	4.09	12	56.55
Kutalimbaru	133.18	1075.17	1230.5	18175.2
Pancur Batu	229.06	260.74	556	6334.35
Namo Rambe	49.47	97.14	160	1693.4
Biru-Biru	3.81	285.28	284	4952.25
<b>S.T.M. Hilir</b>	<b>517.49</b>	<b>3146.26</b>	<b>3757</b>	<b>55349.1</b>
Bangun Purba	29.3	880.89	908	16118.67
Galang	28.16	480.58	511	8812.5
Tanjung Morawa	31.2	168.71	206	2986.5
Patumbak	2.28	27.61	30	481.95
Deli Tua	0.38	0.51	1	6.8
Sunggal	20.55	17.38	44	300.49
Hamparan Perak	168.56	1604.32	1794.5	31238.8
Labuhan Deli	198.62	694.28	940	12317.06
Percut Sei Tuan	458.13	538.35	1128.5	9521.75
Batang Kuis	9.89	53.68	65.5	901.95
Pantai Labu	83.33	403.89	504.5	7217.89
Beringin	4.57	10.23	17	180.78
Lubuk Pakam	-	1.02	1	17.75
Pagar Merbau	15.98	30.37	50.7	530.15
<b>Deli Serdang</b>	<b>2138.07</b>	<b>11755.88</b>	<b>14382.6</b>	<b>210499.34</b>

Sumber: BPS Deli Serdang, 2015.

## 3.2 Teknik Pengumpulan Data

### 3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Kecamatan Sinembah Tanjung Muda (STM) Hulu dan Kecamatan Sinembah Tanjung Muda (STM) Hilir. Jumlah populasi dapat dilihat pada tabel 3.2.1 berikut.

**Tabel 3.2.1 Jumlah populasi petani kelapa sawit di Kabupaten Deli Serdang.**

STM Hulu	Jumlah (KK)	STM Hilir	Jumlah (KK)
Desa Liang Pematang	60	Desa Gunung Rintih	121
Desa Bah-Bah Buntu	150	Desa Lau Barus Baru	121
Desa Gunung Manumpak A	150	Desa Lau Rempak	38
<b>Jumlah</b>	<b>360</b>	<b>Jumlah</b>	<b>280</b>

Populasi dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja (*Purposive Sampling*) dengan pertimbangan bahwa desa yang menjadi populasi mempunyai jarak yang berjauhan di kecamatan tersebut.

### 3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel jumlah petani Kecamatan; Sinembah Tanjung Muda Hilir dan Sinembah Tanjung Muda Hulu. Dalam menentukan jumlah sampel yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini digunakan formula Slovin (Asari, 2018), dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Nd^2}$$

dimana:

N=besarnya populasi, n = besarnya sampel, d= tingkat kepercayaan/ketepatan yang di inginkan

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian menggunakan alfa sebesar 10% dan berdasarkan perhitungan diperoleh jumlah sampel 97,3 dan dibulatkan menjadi 98 responden. Pemilihan sampel responden untuk menentukan desa mana yang menjadi perwakilan penelitian dilakukan secara acak dengan memperhatikan jarak desa tersebut dan menggunakan metode alokasi proporsional. Metode alokasi proporsional adalah teknik sampling yang digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional (Bayuprima *et al*, 2016). Jumlah sampel masing-masing kecamatan didapatkan menggunakan rumus berikut:

$$n_i = (N_i/N)n$$

Keterangan:

$n_i$  = jumlah sampel setiap kecamatan,  $n$  = jumlah sampel seluruhnya,

$N_i$  = jumlah populasi setiap kecamatan,  $N$  = jumlah populasi seluruhnya

Dengan demikian jumlah sampel di Sinembah Tanjung Muda Hilir 39 responden dan Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu berjumlah 59 responden. Penentuan responden yang diwawancarai dilakukan dengan cara mengirimkan undangan FGD kepada camat setempat untuk mengundang petani sawit rakyat berdasarkan desa dan jumlah yang ditentukan peneliti.

### 3.2.3 Jenis Data

Data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keterangan yang benar dan nyata atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Dalam penelitian sumber data yang digunakan yaitu: a) data primer dan b) data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang

diambil dari lapangan melalui wawancara dengan responden dengan menggunakan instrumen kuisioner yang telah dipersiapkan sebelumnya di lokasi penelitian. Data Sekunder adalah data yang diambil dari instansi resmi, seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli serdang, Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang dan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu berupa artikel atau jurnal yang relevan dengan topik dilakukan dengan menggunakan *google scholar*, *sinta*, *research gate* dengan *keyword* atau kata kunci yang sesuai dengan masalah penelitian (Lawolo *et al*, 2022)

Respon yang diberikan responden terhadap pertanyaan dengan menggunakan instrumen kuisioner di lokasi penelitian yang menggunakan sistem *focus group discussion (FGD)* menjadi sumber data utama penelitian. Informasi yang perlu dicari berkaitan dengan: Karakteristik petani dan kebun, luas lahan, umur tanaman, produksi kelapa sawit, penggunaan sarana produksi, harga dan sumber input produksi, proses perawatan dan pemeliharaan kebun, harga dan pemasaran produk pertanian (output), sumber pendanaan, dan informasi lain yang relevan dengan penelitian ini.

Informasi yang dikumpulkan dari dokumen resmi disebut sebagai data sekunder. Informasi dikumpulkan untuk penelitian (Arif, 2017). Data sekunder untuk penelitian ini dikumpulkan dengan berkonsultasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Deli Serdang dalam angka, tinjauan literatur, dan publikasi lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Perlu adanya data sekunder seperti informasi alokasi tenaga kerja untuk penanaman kelapa sawit rakyat per kabupaten dan statistik produksi kelapa sawit per kabupaten.

### **3.3 Teknik Analisis Data**

#### **3.3.1 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Metode pengumpulan data penelitian adalah metode *field research* yaitu terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan data konkrit berupa wawancara responden melalui *focus group discussion (FGD)*, koesioner (angket), dokumentasi dan lainnya kemudian hasil angket tersebut di uji menggunakan uji regresi berganda untuk mengetahui peran kearifan lokal terhadap implementasi sertifikasi ISPO usahatani sawit rakyat serta bagaimana pengaruh implementasi sertifikasi ISPO berbasis kemitraan dan kearifan lokal terhadap usahatani kelapa sawit rakyat berkelanjutan.

Metode skala likert mampu menjawab masalah 1 yaitu tingkat pemahaman petani sawit rakyat terhadap sertifikasi ISPO, implementasi sertifikasi ISPO pada usahatani kelapa sawit rakyat dan peran kemitraan dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO pada usahatani sawit rakyat di Kabupaten Deli Serdang. Skala likert adalah skala unidimensional yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan sikap dan pendapat responden. pemberian skor terhadap hal-hal yang mengharuskan seseorang untuk mengukur sikap, cara pandang, dan persepsi individu atau kelompok terhadap suatu peristiwa atau fenomena sosial. Dalam penelitian ini skala likert menggunakan peringkat lima angka penilaian, yaitu:



**Tabel 3.3.1 Skor Pilihan Jawaban Responden terhadap Pemahaman Implementasi Sertifikasi ISPO**

No	Pilihan	Skor
1.	(SP) = Sangat Paham	5
2.	(P) = Paham	4
3.	(RR) = Ragu-Ragu	3
4.	(TP) = Tidak Paham	2
5.	(STP) = Sangat Tidak Paham	1

**Tabel 3.3.2 Skor Pilihan Jawaban Responden terhadap Implementasi Sertifikasi ISPO berbasis kemitraan dan kearifan lokal**

No	Pilihan	Skor
1.	(SS) = Sangat Setuju	5
2.	(S) = Setuju	4
3.	(RR) = Ragu-Ragu	3
4.	(TS) = Tidak Setuju	2
5.	(STS) = Sangat Tidak Setuju	1

### 3.3.2 Uji Regresi

Untuk menjawab masalah 2 & 3 yaitu menganalisis pengaruh kearifan lokal terhadap minat adopsi sertifikasi ISPO usahatani sawit rakyat serta bagaimana pengaruh kemitraan terhadap minat adopsi sertifikasi ISPO di Kabupaten Deli Serdang metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Menurut Mahesti& Rustika, (2020). Adapun analisis regresi berganda untuk memprediksi variabel dependen penelitian minimal dua variabel independen digunakan. Keputusan didasarkan pada nilai kepentingan, jika nilai p lebih besar dari 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan jika p lebih kecil 0,05 maka variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan sehubungan dengan variabel dependen.

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kemitraan dan kearifan lokal terhadap sertifikasi ISPO digunakan analisis regresi sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Keterangan:

Y = Kesiapan mengadopsi ISPO (dalam poin skala liker 1-5)

X<sub>1</sub>=Kemitraan (dalam poin skala liker 1-5)

X<sub>2</sub>=Kearifan lokal (dalam poin skala liker 1-5)

$\beta_0$ = Konstanta

$\beta_1$ &  $\beta_2$  = Koefisien dari regresi atau beta

Kriteria pengambilan keputusan:

**Secara serempak :**

Jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ , terima H<sub>0</sub> ; tolak H<sub>1</sub> pada taraf kepercayaan 95%.

**Secara Parsial :**

Jika  $T_{hitung} \leq T_{tabel}$ , terima H<sub>0</sub> ; tolak H<sub>1</sub> pada taraf kepercayaan 95%.

Jika  $T_{hitung} > T_{tabel}$ , terima H<sub>1</sub> ; tolak H<sub>0</sub> pada taraf kepercayaan 95%

Model regresi linear berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi-asumsi statistik seperti linearitas, dan multikolinieritas (Nugraha, 2022).

### **3.4 Pengujian Hipotesis**

#### **3.4.1 Pengujian Secara Parsial (Uji t)**

Uji parsial atau uji t yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Di dalam uji t digunakan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>0</sub> :  $\beta_i = 0$ , H<sub>1</sub> :  $\beta_i \neq 0$

Dimana H<sub>0</sub> menunjukkan hipotesis nol, sedangkan H<sub>1</sub> menunjukkan hipotesis alternatif,  $\beta_i$  menunjukkan koefisien variabel independen ke-I. Di dalam

hipotesis nol, besarnya koefisien regresi dinyatakan nol artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel independen ke-I dengan variabel dependennya.

Nilai t-hitung dicari dengan terlebih dahulu mencari nilai derajat bebas (db) atau *degree of freedom (df)*. Derajat bebas ditentukan dengan rumus  $n - k$ . Dimana  $n$  = banyak observasi sedangkan  $k$  = banyaknya variabel. Jika nilai thitung  $>$  t-tabel, dan tingkat nilai signifikansi di bawah 0.05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

### **3.4.2 Pengujian Secara Simultan (Uji F)**

Uji signifikansi simultan atau uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara serentak terhadap variabel dependen. Di dalam uji F digunakan hipotesis sebagai berikut :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0,$$

artinya semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Adapun hipotesis alternatifnya adalah

$$H_1 : H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0,$$

artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai F-hitung  $<$  F-tabel maka  $H_0$  diterima atau  $H_1$  ditolak, sedangkan jika Fhitung  $>$  F-tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Jika tingkat signifikansi di bawah 0.05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

### **3.4.3 Pengujian Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien Determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independent atau predictornya. Range nilai dari  $R^2$

adalah 0-1.  $0 \leq R^2 \leq 1$ . Semakin mendekati nol berarti model tidak baik atau variasi model dalam menjelaskan amat terbatas, sebaliknya semakin mendekati satu model semakin baik.

### 3.5 Analisis SWOT

Untuk menjawab masalah 4 maka dilakukan analisis SWOT. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman (SWOT) adalah teknik untuk menilai hasil situasi untuk menentukan apakah suatu kondisi memenuhi syarat sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancaman. Ini harus digunakan untuk mengatasi masalah.

Pengumpulan data merupakan langkah awal yang dilanjutkan dengan penemuan komponen internal dan eksternal melalui triangulasi jawaban responden. Setelah informasi mengenai faktor internal dan eksternal diperoleh fase kedua melibatkan penetapan bobot dan peringkat. Mengikuti penerapan bobot dan peringkat ke matriks SWOT yang ditampilkan pada Tabel 3.3.3, fase ketiga memerlukan pengembangan model strategis alternatif untuk meningkatkan pemahaman petani kelapa sawit implementasi sertifikasi ISPO berbasis kemitraan dan kearifan lokal menuju sawit berkelanjutan.

**Tabel 3.3.3 Matriks SWOT**

EFAS \ IFAS	Strength (S) (Identifikasi 6 Faktor Kekuatan)	Weaknesses (W) (Identifikasi 6 Faktor Kelemahan)
Opportunities (O) (Identifikasi 6 Faktor Peluang)		
Threats (T) (Identifikasi 6 Faktor Ancaman)		

### **3.6 Definisi dan Batasan Operasional**

Dalam menghindari salah penafsiran dalam memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka diberikan definisi variabel-variabel dan batasan operasional sebagai berikut:

#### **3.6.1 Definisi**

1. Petani sawit rakyat adalah petani yang memiliki dan mengelola kebun kelapa sawit dengan luas lahan kurang dari 25 hektar. Mereka biasanya merupakan keluarga kecil yang mengandalkan kebun kelapa sawit sebagai sumber pendapatan utama.
2. Sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) adalah sebuah tanda jaminan bahwa produk kelapa sawit diproduksi dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sertifikasi ini memastikan bahwa produk kelapa sawit dihasilkan dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
3. Kemitraan adalah hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih.
4. Kearifan Lokal adalah pengetahuan, nilai-nilai, dan norma yang dimiliki oleh suatu komunitas dan diwariskan dari generasi ke generasi.
5. Pemahaman petani adalah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki oleh petani dalam mengelola lahan, menanam tanaman, dan memelihara kelapa sawit.
6. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum bersama Undang-Undang serta kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara

7. Pengusaha kelapa sawit adalah badan usaha yang bergerak di bidang usahabudidaya, pengolahan, dan/atau perdagangan kelapa sawit
8. Peningkat kelestarian lingkungan adalah upaya untuk menjaga dan melindungilingkungan hidup agar tetap lestari dan terjaga keseimbangannya
9. Penguatan Kelembagaan adalah upaya untuk meningkatkan kinerja danefektivitas suatu lembaga

### **3.6.2 Batasan Operasional**

1. Daerah penelitian ini adalah Kecamatan Sinemba Tanjung Muda (STM) Hulu dan Sinemba Tanjung Muda (STM) Hilir di Kabupaten Deli Serdang
2. Jumlah sampel dalam penelitian adalah 98 petani sawit rakyat
3. Penelitian dilaksanakan waktu penelitian lapang pada bulan Mei 2024